

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (1992). *Berjuang Menghadapi Perkembangan Massa*. Yogyakarta: Liberty.
- Antony, N. D. (2020, Juni 25). *Kasus Corona Makassar Masih Tinggi, Gubernur Sulsel Akan Ganti Pj Wali Kota*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5067216/kasus-corona-makassar-masih-tinggi-gubernur-sulsel-akan-ganti-pj-wali-kota>
- Assegaf, H. D. (2005). *Teori Media Massa Dalam Pemberitaan Surat Kabar*. Bandung: Granit.
- Baran, J. S., & Davis, K. D. (2010). *Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan. Edisi 5. Penerjemah: Afrianto Daud dan Putri Iva Izzati*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Berger, L. P., & Luckmann, T. (1966). *The Sosial Contruction of Reality, The Treatise In The Sociology of Reality*. Garden City: N.Y.: Doubleday.
- Brighton , P. &., & Foy, D. (2007). *News Value*. London: SAGE Publications Ltd.
- Bungin, M. B. (2007). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Maysrakat*. Jakarta: Kencana.
- Cipto, H. (2020, Juni 25). *Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Gubernur Sulsel Ganti Pj Wali Kota Makassar*. Retrieved Agustus 3, 2020, from Kompas.com.
- Detik.com. (2020, Juni 25). *Kasus Corona Makassar Masih Tinggi, Gubernur Sulsel Akan Ganti Pj Wali Kota*. Retrieved Agustus 2, 2020, from Detik.com.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2019). *Media Dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkaiian (Framing) dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Halik Abdul. (2013). Komunikasi Massa. In *Komunikasi Massa* (p. 234). Makassar: Alauddin University Press.
- Halik, A. (2013). Komunikasi Massa. In *Komunikasi Massa* (p. 233). Makassar: Alauddin University Press.
- Halik, A. (2013). Komunikasi Massa. In *Komunikasi Massa* (p. 234). Makassar: Alauddin University Press.
- Harahap, D. A. (2020, Mei 12). *UPAYA MEMUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19*. Retrieved from osf.io: <https://osf.io/sk89m/download/?format=pdf>
- Hidayat. (2007). *Peran dan Fungsi Media Massa*. Yogyakarta: Granit.
- Inung, S. C. (2012). *Menulis Berita di Media Massa*. Yogyakarta: PT Citra Aji Prama.
- Kompas.com. (2020, Mei 21). *Beda Kebijakan Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar Soal Shalat Id*. Retrieved Agustus 10, 2020, from Kompas.com.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Littlejohn, Stephen W, &, & A, K. F. (2008). *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Littlejohn, S., & Karen, A. (2009). *Theories of Human Communication, oleh Mohammad Yusuf Hamdan, 9 th ed. Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- McCargo, D. (2012). *Partisan Polyvalence; Characterizing The Political Role of Asian Media*. In D. Hallin & P. Mancini (Eds), *Comparing Media Systems Beyond The Westren World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail. Buku 2. Terjemahan oleh Putri Iva Izzati*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Morissan, d. (2010). *Teori Komunikasi Massa. Media, Budaya dan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nanang, M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Cet; 3 PT RajaGrafindo Persada.

- Nugraheni, A. (2020, Mei 8). *Membaca Arah Pemberitaan Covid-19*. Retrieved from Kompas.id: <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/08/membaca-arrah-pemberitaan-covid-19/>
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, G. S. (2020, Maret 12). *Sains*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Rakhmadan, R. (2020). Objektivitas Media di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Isi Berita tentang Penerapan New Normal di Indonesia pada Media Tirto.id. *JURNAL AUDIENS Vol. 1 No. 2*, 244.
- Romli, M. A. (2012). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sebayang, R. (2020, Maret 12). *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Shoemaker, J. P., & Reese, D. S. (1996). *Mediating The Message*. New York : Longman Publisher.
- Siregar, E. A., Rahayu, Rianto, P., & Adiputra, M. W. (2014). Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia, Mengungkap Independensi Media. *Jurnal Dewan Pers, Edisi No. 9 Juni* , 2.
- Siune, K., & Borre, O. (1975). Setting the Agenda for a Danish Election. *Journal of Communication* 25, 65-73.
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo. (2010). *Media Massa, Pers dan Jurnalistik*. Jakarta: Grafindo.
- Sumadiria. (2005). *Penilaian Unit Analisis Berita*. Jakarta: Grafindo.
- Tamburaka, A. (2013). *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Taspell, R. (2008). *Kuasa Media di Indonesia. Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, Penerjemah Wisnu Prasetyo Utomo*. Jakarta: Marjin Kiri.

- Tribuntimur.com. (2020, Mei 20). *Apa Maksudnya Beda Aturan Gubernur Sulsel dan PJ Walikota Makassar Soal Salad Id, Warga Ikut Mana?* Retrieved Agustus 1, 2020, from Tribuntimur.com.
- Weaver, e. a. (1981). *Media Agenda Setting in Presidential Election, Issue Image and Interest*. New York :: Praeger Publisher.
- Weber, P. R. (1990). *Basic Content Analysis*. California: Sage Publication.
- Wimmer, D. R., & Dominick, R. J. (2000). *Mass Media Research: An Introduction- 9th Edition*. New York: Amerikan Marketing Association (Crown Publishing).
- Wiryawan. (2007). *Unsur-Unsur Berita Dalam Surat Kabar*. Jakarta: Erlangga.
- Wisnu, P. U. (2020). Jurnalisme Krisis dan Krisis Jurnalisme Di Era Covid-19. In *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indones: Kajian Awal: Jurnalisme Krisis dan Krisis Jurnalisme Di Era Covid-19* (p. 300). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wright, C. R. (1985). *Sosiologi Komunikasi Massa, terjemahan Jalaluddin Rakhmat*. Bandung: Remaja Karya.
- Yosal Iriantara, A. Y. (2006). *Public Relations Writing: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

LAMPIRAN

Gubernur Sulsel Tegaskan Tidak Ada Pelonggaran Aturan PSBB

[Sabtu, 16 Mei 2020 15:28](#)

Editor: [Adi Mirsan](#)



FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Hari ini, Sabtu (16/5/2020) penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di Kota Makassar memasuki hari ke sembilan. Setelah ditetapkan pada

Jumat (8/5/2020) dan akan berakhir pada 22 Mei mendatang.

Kendati demikian beberapa fasilitas umum mulai beroperasi termasuk mal yang digadang-gadang akan buka dalam waktu dekat guna memutar roda perekonomian nampaknya ditepis oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Menurutnya tidak ada pelanggaran selama masa PSBB jika angka penyebaran Covid-19 belum menurun dan belum adanya informasi yang kongkrit terkait kebijakan memberi izin mall untuk buka.

“Saya tegaskan sekali lagi, [pelonggaran PSBB](#) tidak akan kita lakukan jika tren peningkatan pasien Covid-19 masih sangat terjadi,” ucap mantan Bupati Kabupaten Bantaeng, Sabtu (16/5/2020).

Menurutnya pembatasan sosial tetap akan berlaku jika berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak yang bisa menjadi salah

satu pemicu terjadinya penyebaran Covid-19. Meskipun diketahui ada beberapa usaha yang tetap beroperasi selama PSBBB seperti usaha kebutuhan bahan pokok, alat kesehatan dan lain sebagainya.

“Saya juga ingin meluruskan pemberitaan mengenai mal di Makassar yang akan dibuka. Hal ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan konkrit, apalagi Makassar sementara PSBB,” ungkap Nurdin dalam keterangan perbelanjaan modern agar menghindari yang namanya pekerja dirumahkan atau di PHK. Terlebih bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan.

“Ini mengingat usaha mereka sudah tutup hampir dua bulan dan berdampak terhadap banyaknya karyawannya,” terang Nurdin Abdullah. **(anti/fajar)**

Tegas! Gubernur Sulsel: Mal Ditutup

[Kamis, 28 Mei 2020 20:21](#)

Editor: [Edy Arsyad](#)



rapat koordinasi bersama Forkompinda, pelaku usaha, MUI Sulsel dan seluruh OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – [Gubernur Sulsel](#), HM [Nurdin Abdullah](#) menegaskan fasilitas umum seperti mal masih ditutup sampai ada kebijakan pusat untuk diperbolehkan. Pasalnya, saat ini semua sudah satu garis komando yakni sesuai aturan Pemerintah Pusat.

“Nggak, nggak (mal), tadi sudah dipertegas. Tidak ada kebijakan daerah kebijakan pusat kita satu komando,” tegas [Nurdin Abdullah](#), di Posko Covid-19 Manunggal, Kamis sore 28 Mei 2020.

Penegasan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Forkompinda, pelaku usaha, MUI Sulsel dan seluruh OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel.

Gubernur dan Forkopimda mengumpulkan GM Mal, PD Pasar, Perhotelan dan Restoran dan pelaku usaha lainnya agar

masyarakat Sulsel tidak panik dan dunia usaha gelisah dengan kebijakan pemerintah.

“Makanya tadi kita kumpulkan, kita kan tidak ingin melakukan sesuatu di lapangan yang akan membuat masyarakat panik, dunia usaha menjadi gelisah. Sehingga kita undang, itulah cara-cara persuasif yang kita lakukan bersama bapak Panglima Kodam, Kapolda dan seluruh Forkompinda,” urainya.

Dirinya mengaku, semua pihak sudah dijelaskan bagaimana tahapan serta fase-fase, jika Sulsel masuk dalam skenario uji kehidupan normal atau new normal life.

Gubernur Tegur PJ Walkot Tak Serampangan Keluarkan Kebijakan

[Selasa, 26 Mei 2020 10:12](#)

Editor: [Redaksi](#)



Gubernur Sulsel H Nurdin Abdullah.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan teguran keras ke PJ Walkot Yusran Yusuf agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan ditengah pandemic covid-19.

Kebijakan Yusran Yusuf yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan, ditengah kampanye Pempov Sulsel meminta warga beraktifitas dirumah saja sangat berisiko.

Menurutnya, kebijakan PJ Walkot tersebut sangat tidak populis, dan sebaliknya justru akan merugikan masyarakat

“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap dirumah saja, justru PJ Walkot membolehkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini, dan tidak mempertimbangkan dampaknya,” ujarnya.

Nurdin Abdullah menuturkan, seharusnya PJ Walkot berkordinasi dengan Pemprov Sulsel dalam setiap keputusannya. Apalagi ini menyangkut keselamatan banyak orang.

Membuka ruang resepsi pernikahan dibolehkan, sama saja memberi ruang penyebaran covid-19.

“Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran covid-19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu. Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras, mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-19,”paparnya.

Untuk itu, Nurdin meminta PJ Walkot yang mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan. (rls)

Besok Siang Prof Yusran Dilantik sebagai Pj Wali Kota Makassar Gantikan Iqbal Suhaeb

Selasa, 12 Mei 2020 23:26



DOK HUMAS SETPROV SULSEL

Ketua TGUPP Sulsel Prof Yusran Yusuf, Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, dan anggota TGUPP Ariady Aarsal.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, [Prof Yusran Yusuf](#) baru menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel selama 76 hari.

Tepat Rabu (26/2/2020) lalu ia dikukuhkan dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani di ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar.

Siapa sangka, Prof Yusran kembali dilantik dengan jabatan baru, sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, menggantikan M Iqbal Suhaeb.

"SK Kemendagri (Sebagai Pj Wali Kota) itu diteken 11 Mei. Saya dapat info jam 9 malam tadi. Pak Gub yang infokan. Saya disuruh mempersiapkan diri untuk dilantik," kata Prof Yusran yang dihubungi, Selasa malam.

Rencananya SK tersebut akan diberikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Balaikota Makassar Jl Ahmad Yani, Rabu (13/5/2020) siang.

"Jam 1 siang proses pelantikannya dan penerimaan SK, Pak Gub yang lantik. Sebagai perpanjangangan Kemendagri," kata Yusran.

Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu jugab telah mempersiapkan diri untuk menjalani proses pelantikan sebagai kepala daerah.

"Pakaian sudah ada. Tidak adaji persiapan khusus. Doakan saja ie," katanya.

Seperti diketahui, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.73-779 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Makassar Provinsi Sulsel. Surat ditetapkan di Jakarta pada 11 Mei 2020 tertanda Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Petikan yang sah sesuai dengan aslinya diteken Sekretaris Ditjen Otda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Didi Sudiana dengan tandatangan dan stempel basah yang ditujukan ke Prof Yusran.

Dikonfirmasi malam tadi Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala membenarkan terbitnya surat keputusan (SK) [Pj Wali Kota Makassar](#).

"Dan besok (hari ini) sudah ada pelantikan," katanya.

"Masa jabatan [Pj Wali Kota Makassar](#) Iqbal Suhaeb sudah berakhir pada jam 00.00 Wita malam ini," jelasnya

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Besok Siang Prof Yusran Dilantik sebagai Pj Wali Kota Makassar Gantikan Iqbal Suhaeb, <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/besok-siang-prof-yusran-dilantik-sebagai-pj-wali-kota-makassar-gantikan-iqbal-suhaeb>.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali

Editor: Imam Wahyudi

Pj Wali Kota Makassar Sudah Bolehkan Gelar Resepsi, Nikah, Yuk!

Senin, 25 Mei 2020 21:20



tribunnews.com

ILUSTRASI: Pesta resepsi pernikahan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dihentikan petugas lantaran khawatir dengan adanya kerumunan massa di tengah wabah corona, Sabtu (21/3/2020). (Istimewa)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PJ Wali Kota Makassar Yusran Jusuf menerbitkan Perwali Kesehatan tentang

penanggulangan virus Corona (Covid 19) di Makassar, Senin (25/5/2020).

Perwali tersebut bernomor: 31 Tahun 2020, diterbitkan pasca berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah Pandemi Covid 19.

Dalam perwali tersebut, sejumlah tempat keramaian dianjurkan menyiapkan fasilitas kesehatan, seperti cairan disinfektan dan termometer (infrared), khususnya di mall.

Lantas bagaimana dengan hajatan sunatan ataupun perkawinan?

PJ Wali Kota Makassar Yusran Jusuf angkat bicara mengenai hal tersebut.

Menurut Yusran, acara [resepsi](#) ini tidak dilarang, hanya saja pemilik hajatan wajib mengadakan dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Tidak membatasi silaturahmi, tapi jaga kesehatan. Intinya dimana pun berada, apapun aktivitasnya wajib melakukan protokol kesehatan," katanya.

Khusus untuk hajatan, tentu pemilik hajatan juga harus melakukan pembatasan tamu undangan, dengan mengatur separuh dari kapasitas ruangan.

"Tetap diatur jumlahnya, seperti sunatan, dan perkawinan. Jaga social distancing. Misal jumlah ruangan kapasitas 100 tamu undangan, ya undangan 50 orang," ujar Yusran.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pj Wali Kota Makassar Sudah Bolehkan Gelar Resepsi, Nikah, Yuk!, <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/25/pj-wali-kota-makassar-sudah-bolehkan-gelar-resepsi-nikah-yuk>.

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Imam Wahyudi

[Pj Wali Kota Makassar Diganti](#)

Yusran Hanya 44 Hari Jabat Pj Wali Kota Makassar, Dr Hasrullah: Ini Sejarah, Dipermalukan Pimpinan

Kamis, 25 Juni 2020 20:47



Dok Pribadi

Dosen tetap Fisip Unhas, Hasrullah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, [Dr Hasrullah](#), menyampaikan rasa empatinya terkait pencopotan Prof [Yusran Jusuf](#) sebagai Pj Wali Kota Makassar.

Sebagai sesama akademisi di Unhas, [Dr Hasrullah](#) menilai pencopotan jabatan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah, adalah bentuk komunikasi leadership yang keliru.

Ini dikarenakan Prof Yusran baru menjabat sebagai Pj Wali kota selama 44 hari, setelah resmi menggantikan Iqbal M Suhaeb yang selesai masa tugasnya.

"Kami juga ini kaget pak Yursan ini sebagai sahabat, kasian juga sih dan sering ketemu. Terlalu dini ini diselesaikan, saya menganggap ini adalah sejarah se-Indonesia, dan ini sama dengan dipermalukan sama pimpinannya," ucapnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).

Dalam waktu sesingkat itu Prof Yusran menjalankan amanah Gubernur Sulsel dianggap terlalu dini untuk diberhentikan.

Dr Hasrullah menerangkan bahwa langkah yang diambil Nurdin Abdullah sebagai Gubernur dengan mencopot Pj Wali Kota Makassar menunjukkan cerminan kualitas komunikasi leadership yang kurang baik.

"Intinya di komunikasi leadership, bagaimana harus menghargai bawahan. PJ Wali kota itu bukan seperti supir tembak yang tiba-tiba disuruh turun dan diganti," tegasnya.

Apalagi dalam pemerintahan menurut Wakil Dekan III FISIP Unhas itu, perlu berbagai tahapan semisal evaluasi.

"Setahu saya tidak ada itu evaluasi 42 hari apalagi dicopot langsung, yang ada itu evaluasi 100 hari coba lihat misal Gubernur sampai Presiden itukan ada hitungan 100 hari kerja baru dievaluasi bukan langsung diminta mundur apalagi diberhentikan," paparnya.

Kesalahan Awal

Dr Hasrullah membeberkan bahwa gaya kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur menimbulkan sejumlah problem di kota Makassar.

Ini tercermin dari pergantian Pj Wali kota yang saat itu masih dijabat oleh M Iqbal Suhaeb ke [Yusran Jusuf](#).

"Waktu iqbal suhaeb diganti itukan memang sudah waktunya apalagi karena kencang-kencangnya pelaksanaan PSBB, dan dia menelan pil pahit karena tidak patuh dengan Gubernur yang mau ada pelonggaran," ungkapnya.

Sementara itu saat Yusran menjabat tak lama berselang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar dicabut.

"Yusran datang dilonggarkan, PSBB dicabut, karena mungkin Pak Yusran menjalankan perintah atasannya. Saya kira ini merespon perintah Gubernur sehingga menunjukkan ada sinkronisasi Yusran dan Gubernur ini bisa dijalankan," sambungnya.

Hanya saja lebih lanjut [Dr Hasrullah](#) melihat kemungkinan ada beberapa kebijakan [Yusran Jusuf](#) dalam penanganan Covid-19 tidak berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel.

Semisal pernyataan-pernyataan kontroversinya terkait ingin mengijinkan pesta pernikahan mulai bisa digelar.

Sementara itu belakangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mulai bersikap tegas terhadap kepala daerah yang wilayahnya masih zona merah Covid-19.

"Nah sekarang kita zona merah, jadi memang ada dua yang perlu disoroti yakni kinerja Yusran sebagai Pj Wali kota dan tentu Gubernur, tapi dalam situasi ini lebih baik ada evaluasi detail dulu bukan langsung mencopot," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Yusran Hanya 44 Hari Jabat Pj Wali Kota Makassar, Dr Hasrullah: Ini Sejarah, Dipermalukan Pimpinan, <https://makassar.tribunnews.com/2020/06/25/yusran-hanya-44-hari-jabat-pj-wali-kota-makassar-dr-hasrullah-ini-sejarah-dipermalukan-pimpinan?page=all>.

Penulis: Alfian

Editor: Imam Wahyudi

NA: Selesaikan Covid-19 di Makassar, Maka 70% Masalah di Sulsel Selesai

Senin, 15 Juni 2020 16:12



Humas Pemprov Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) [Nurdin Abdullah](#) kembali menyoroti Makassar sebagai daerah di Sulsel dengan tingkat penambahan pasien Covid-19 terbesar di Sulsel.

"Selama kita tidak memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, saya kira kita agak sulit di Makassar," ujar NA dalam rilisnya, Senin (15/6/2020).

"Kalau kita bisa selesaikan (Covid-9) di Makassar, maka 70 persen masalah Covid-19 di Sulsel ini selesai," jelas NA.

Menurut Bupati Bantaeng 2 periode itu, memperketat protokol kesehatan sangat penting untuk menekan penularan, terutama di tempat tertentu.

"Makanya protokol kesehatan menjadi penting. Bisa kita lihat di beberapa tempat belum menerapkan protokol kesehatan. Kedua, tracking dan testing memang harus dilakukan secara massif," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, edukasi kepada masyarakat sangat penting, khususnya di Makassar.

"Seperti saya katakan tadi, 70 persen itu ada di Makassar. Jadi kalau Makassar ini tuntas, maka 70 persen persoalan covid selesai," katanya.

Ia pun meminta kepada seluruh pihak terkait agar memperketat protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. (tribun-timur.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul NA: Selesaikan Covid-19 di Makassar, Maka 70% Masalah di Sulsel Selesai, <https://makassar.tribunnews.com/2020/06/15/na-selesaikan-covid-19-di-makassar-maka-70-masalah-di-sulsel-selesai>.

Penulis: Muhammad Fadhy Ali

Editor: Suryana Anas

Covid-19 Tembus 606 dan Terus Naik, Makassar Setop PSBB dan Bolehkan Toko Buka

Hasbi Zainuddin

22 Mei 2020 12:07 WITA



Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf

Terkini.id, Makassar – Kasus Covid-19 khusus di Kota Makassar mencapai angka 606 pasien per Kamis 21 Mei 2020 kemarin dengan penambahan 18 pasien sepanjang hari kemarin.

Angka itu berkontribusi terhadap peningkatan kasus covid Sulsel yang mencapai angka 1.135 per Kamis kemarin dengan penambahan kasus baru sebanyak 34 pasien.

Namun di tengah peningkatan angka kasus tersebut, Pemerintah Kota Makassar memilih untuk tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pemkot Makassar bahkan akan membolehkan toko toko untuk beroperasi kembali.

Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf telah menegaskan tak akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk tahap ketiga.

Yusran mengungkapkan akan mengganti Peraturan Wali Kota (Perwali) yang selama ini menjadi payung hukum selama penerapan PSBB dengan Perwali baru.

“PSBB jelas tidak dilanjutkan, tetapi kita sudah membuat Perwali baru tentang penerapan protokol kesehatan,” terang Yusran, Kamis, 21 Mei 2020.

Menurut Yusran, Perwali yang baru nantinya akan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

“Kurang lebih hampir sama. Kita mengadopsi protokol kesehatan yang dibuat oleh BNPB Pusat,” ucapnya.

Yusran mengatakan semua toko setelah PSBB berakhir akan diperbolehkan untuk beroperasi selama menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau kemarin kan ada beberapa Toko ditutup, kalau sekarang semua boleh membuka, sepanjang dia menerapkan prosedur kesehatan,” katanya.

“Aturannya sama, antara lain social distancing, jaga jarak, pake masker. Hanya memang lebih dibuka ruang,” terang mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas tersebut.

Dinilai Gagal Kendalikan Corona, Pj Wali Kota Makassar Diganti



Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran Yusuf.

Terkini.id, Makassar – Baru 43 hari menjabat sejak dilantik pada 13 Mei 2020 lalu, namun Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf harus lengser dari jabatannya lantaran dinilai gagal mengendalikan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

“Insya Allah siang hari ini atau Jumat besok saya mengakhiri Jabatan Penjabat Wali kota,” kata Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, Kamis, 25 Juni 2020.

Ia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf selama menjadi Penjabat Wali Kota Makassar.

“Terima kasih atas kerjasama bapak atau ibu dan mohon maaf jika ada khilaf selama menjabat Penjabat,” singkatnya.

Pergantian Jabatan Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf terkesan mendadak. Pasalnya, Yusran sendiri belum bisa memastikan soal pelengseran jabatannya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 29 September 2020

K e p a d a

Nomor : 070 / 1712 - II/BKBP/IX/2020
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Lampiran

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6629/S.01/PTSP/2020, Tanggal 25 September 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : NURJANNAH
NIM / Jurusan : E022182008 / Ilmu Komunikasi
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : "ANALISIS ISI KECENDERUNGAN AGENDA MEDIA DALAM PEMBERITAAN PRO KONTRA PROF. YUSRAN (PJ WALI KOTA MAKASSAR) VS PROF. NURDIN ABDULLAH (GUBERNUR SULSEL) PADA FAJAR.CO.ID TRIBUNTIMUR.COM DAN MAKASSAR.TERKIN.LID"

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Tesis** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 29 September s/d 25 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.**

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN


H. H. JAMAING, M.Sc
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19601231 198003 1 064

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Izin Penelitian di Kota Makassar :
Nomor : 070/P/2 -II/BKBP/IX/2020
Tanggal : 29 September 2020

NAMA LOKASI PENELITIAN DI KOTA MAKASSAR :

1. PIMPINAN REDAKSI FAJAR.CO.ID KOTA MAKASSAR;
2. PIMPINAN REDAKSI TRIBUNTIMUR.COM KOTA MAKASSAR;
3. PIMPINAN REDAKSI MAKASSAR.TERKINI.ID KOTA MAKASSAR;